

## **EFEKTIVITAS UPAYA PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI YUNANI: Analisis Istanbul Convention 2018-2022**

**Adelia Citra Dwi Trisnawati<sup>1</sup>, Firsty Chintya Laksmi Perbawani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur

Correspondent author: [firsty.chintya.hi@upnjatim.ac.id](mailto:firsty.chintya.hi@upnjatim.ac.id)

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

### **Abstract**

*Gender-based violence is a phenomenon that is widespread throughout the world and is a concern for human security. For this reason, the Council of Europe formed the Istanbul Convention to combat gender-based violence, especially in Europe. The main focus of this research is to analyze the effectiveness of the Istanbul Convention as an international regime in Greece, as the country with the lowest level of gender equality in Europe, using Regime Effectiveness theory. The research method uses an explanatory research type which aims to explain the position of the variables studied and the cause-and-effect relationships that exist between the variables. The results of this research prove that the Istanbul Convention can be categorized as an effective international regime in Greece, along with the implementation of policies that are in line with the values and objectives of the convention. Thus, this research shows that the Istanbul Convention was able to achieve its effectiveness as an international regime in Greece.*

**Keywords: Effectiveness; Gender Based Violence; Greece; Istanbul Convention**

### **Abstrak**

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena yang tersebar di seluruh dunia dan menjadi kekhawatiran bagi keamanan manusia. Untuk itu, Council of Europe membentuk Istanbul Convention untuk memerangi kekerasan berbasis gender, khususnya di Eropa. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Istanbul Convention sebagai rezim internasional di Yunani, sebagai negara dengan tingkat kesetaraan gender paling rendah di Eropa, dengan menggunakan teori Efektivitas Rezim. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan sebab-akibat yang ada antar variabel. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Istanbul Convention dapat dikategorikan sebagai rezim internasional yang efektif di Yunani, seiring dengan implementasi kebijakan yang sejalan dengan nilai dan tujuan konvensi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Istanbul Convention mampu mencapai efektivitasnya sebagai rezim internasional di Yunani.

**Kata Kunci: Efektivitas; Istanbul Convention; Kekerasan Berbasis Gender**

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang saat ini banyak terjadi di seluruh penjuru dunia yang berdampak pada individual berdasarkan jenis kelamin dan/atau identitas gender. Kekerasan ini disebabkan pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan peran gender yang ditetapkan secara sosial yang masih berakar kuat dalam benak masyarakat. Kekerasan berbasis gender juga diartikan sebagai

kekerasan yang mencerminkan ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dan melanggengkan subordinasi dan merendahkan nilai (devaluasi) perempuan dibandingkan laki-laki (Rico, 1997). Kekerasan ini pulalah yang terus menjadi salah satu pelanggaran manusia yang paling menonjol di masyarakat. *Istanbul Convention* mengategorikan kekerasan berbasis gender menjadi empat bentuk; kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi. Beberapa contoh bentuk kekerasan berbasis gender yang sering terjadi adalah kekerasan oleh pasangan (*intimate partner violence*), pelecehan dan kekerasan seksual, mutilasi alat kelamin perempuan, hingga pembunuhan perempuan demi kehormatan (*honor killing*).

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena yang menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk kawasan Eropa. Eropa memiliki tradisi panjang aktivisme perempuan, menyampaikan isu seputar partisipasi perempuan dalam politik, kekerasan seksual, kesenjangan upah (Sosa, 2020). Walau begitu, di kawasan Uni Eropa (UE) terdapat satu dari tiga perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun seksual (European Commission, 2022) dengan skor indeks kesetaraan gender yang dibuat oleh *European Institute for Gender Equality* (EIGE) sebesar 68.6 dari 100. Survey EIGE juga menyatakan bahwa negara anggota UE yang menempati tingkat kesetaraan gender yang paling rendah adalah negara Yunani dengan skor indeks kesetaraan gender sebesar 53.4 dari 100 (European Institute for Gender Equality). Di Yunani sendiri bentuk kekerasan terhadap perempuan yang kerap terjadi adalah kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual oleh pasangan dengan tingkat persentase sebesar 19% (UN Women, n.d.). Pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 3.683 kasus dibandingkan pada tahun 2020 (Greek Republic, 2021). Tidak hanya itu, di Yunani, kekerasan juga terjadi pada perempuan yang sedang mengandung, dengan sekitar 6% perempuan mengalami kekerasan di masa kehamilan (Antoniou & Iatrakis, 2019). Salah satu tantangan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Eropa adalah kurangnya data yang terkumpul terkait kekerasan berbasis gender, terlebih di Yunani dengan pandangan bahwa kekerasan berbasis gender masih merupakan hal yang tabu untuk dibahas (Kravvariti & Browne, 2023). Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya data yang dapat diandalkan dan dapat dibandingkan mengenai kasus-kasus kekerasan berbasis gender (European Institute for Gender Equality).

Pengumpulan data yang masih kurang dan belum maksimal dari seluruh negara UE dan adanya perbedaan kebijakan domestik dalam merespon kasus kekerasan berbasis gender merupakan dasar dari dibentuknya *Istanbul Convention* (*The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence*) yang dibentuk oleh *Council of Europe* (CoE) pada 7 April 2011 dan diresmikan

pada 11 Mei 2011 (Council of Europe, n.d.). *Istanbul Convention* sendiri merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia utama yang menetapkan dan menerapkan standar hukum untuk menjamin hak perempuan agar bebas dari kekerasan dan merupakan instrumen pertama di Eropa yang menetapkan standar hukum yang mengikat (legally binding) untuk mencegah kekerasan berbasis gender, melindungi korban, serta memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan tersebut (Council of Europe, n.d.). Perjanjian ini telah diratifikasi oleh 38 negara dan UE, termasuk Yunani. *Istanbul Convention* juga diakui sebagai rezim internasional berdasarkan definisi Stephen Krasner (1983) yang mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang implisit atau eksplisit yang menjadi tempat berkumpulnya ekspektasi para aktor dalam bidang hubungan internasional tertentu (Krasner, 1983).

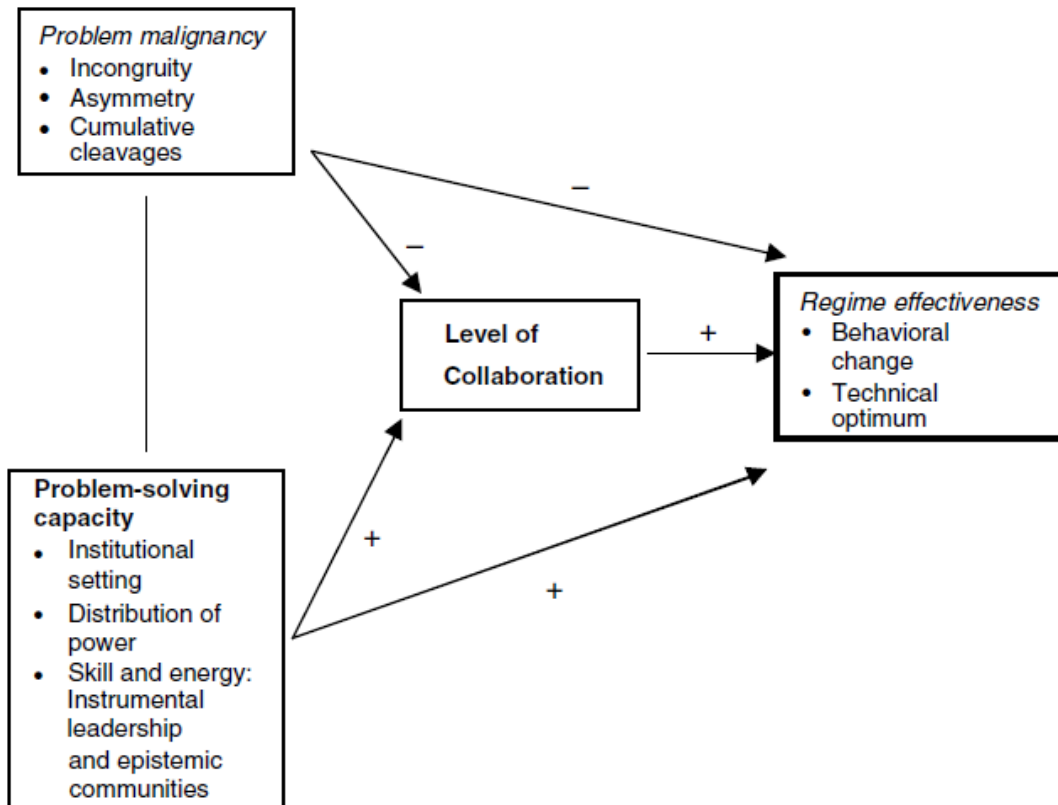
Penelitian ini membahas terkait efektivitas *Istanbul Convention* sebagai rezim internasional di Yunani dalam jangkauan tahun 2018-2022 dengan menggunakan kerangka teori Efektivitas Rezim oleh Arild Underdal, untuk mengetahui efektivitas *Istanbul Convention* di salah satu negara anggotanya, yaitu Yunani. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang dikemukakan oleh Arild Underdal untuk mengetahui efektivitas sebuah rezim, yaitu *dependent variable*, *independent variable* dan *intervening variable* (Underdal, 2002).

## METODE

Penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan sebab-akibat yang ada antar variabel (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh dari sumber yang valid seperti laporan negara (*state report*), website resmi, buku dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Teori Efektivitas Rezim milik Arild Underdal menyatakan bahwa efektivitas rezim dapat dilihat melalui fungsi atau kemampuannya untuk memecahkan permasalahan yang menjadi dasar terbentuknya rezim tersebut. Underdal (2002) menjelaskan tolak ukur kesuksesan sebuah rezim melalui upaya kerja sama dan implementasi rezim yang selaras dengan tujuannya untuk memecahkan permasalahan dasar terbentuknya rezim tersebut. Implementasi tersebut dapat dilihat dari perilaku para aktor yang terikat dengan rezim tersebut. Semakin baik sebuah rezim dalam memecahkan masalah tersebut, maka semakin efektif pula rezim tersebut (Underdal, 2002). Terdapat 3 variabel yang dikemukakan Underdal dalam menganalisis efektivitas sebuah rezim, yaitu, *dependent variable* (variabel terikat);

kedua, *independent variable* (variabel bebas); dan ketiga, *intervening variable* (variabel intervensi) (Underdal, 2002).



**Gambar 1.** Core model efektivitas rezim oleh Underdal (2002)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembentukan *Istanbul Convention*

*Istanbul Convention* dibentuk oleh *Council of Europe* pada 7 April 2011 dan diresmikan pada 11 Mei 2011 di Istanbul, Turki, dan dibuka untuk ditandatangani di hari yang sama, serta mulai berlaku pada 1 Agustus 2014 (Council of Europe, n.d.). *Istanbul Convention* dibentuk untuk memerangi kekerasan berbasis gender, utamanya perlindungan bagi korban kekerasan. Konvensi ini merupakan hasil upaya berkelanjutan oleh *Council of Europe* dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 1990-an, beberapa diantaranya adalah *The Council of Europe Recommendation 2002* dari Komite Menteri (*Committee of Ministers*) kepada negara-negara anggota untuk melindungi perempuan dari kekerasan, bersama dengan kampanye di Eropa antara tahun 2006 dan 2008 untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga, menunjukkan variasi respons nasional terhadap isu ini di seluruh Eropa. Kampanye tersebut menggarisbawahi kebutuhan standar hukum yang seragam untuk memastikan bahwa korban kekerasan berbasis gender mendapatkan perlindungan hukum

yang setara di seluruh Eropa. (Council of Europe, n.d.). *Istanbul Convention* mendapat respon yang cukup baik saat pembentukannya dengan sekitar 40 persen dari jumlah anggota CoE menandatangani pembentukan *Istanbul Convention* di waktu yang sama. Saat ini *Istanbul Convention* telah diratifikasi oleh 38 negara dan Uni Eropa. Konvensi ini merupakan instrumen pertama di Eropa yang menetapkan standar yang mengikat secara hukum (*legally binding*) untuk mencegah kekerasan berbasis gender, melindungi korban kekerasan dan memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan (European Parliament, 2022).

*Istanbul Convention* dibentuk dengan empat pilar, yaitu *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *prosecution* (penuntutan), dan *integrated policies* (kebijakan yang terintegrasi). Pertama, pencegahan berfokus pada langkah-langkah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup inisiatif seperti kampanye peningkatan kesadaran, program pendidikan dan pelatihan bagi para profesional untuk mengenali dan menanggapi tanda-tanda awal kekerasan. Kedua, perlindungan bertujuan untuk memastikan keamanan dan dukungan bagi para korban kekerasan, yang mencakup penyediaan akses ke layanan dukungan, seperti tempat penampungan dan hotline, serta perlindungan hukum dan bantuan dalam pemulihan dan rehabilitasi korban. Ketiga, penuntutan menekankan perlunya pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dan menerapkan langkah-langkah hukum yang tegas dan efektif untuk memastikan bahwa para pelaku dituntut dan dihukum atas kejahatan mereka. Pilar terakhir, yaitu kebijakan yang terintegrasi berfokus pada pengembangan dan implementasi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Hal ini mencakup integrasi pendekatan berbasis hak asasi manusia, pendanaan yang memadai untuk kebijakan dan layanan serta pengumpulan data.

### **Implementasi *Istanbul Convention* di Yunani**

Yunani meratifikasi *Istanbul Convention* pada 18 Juni 2018 dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 2018. Keputusan untuk meratifikasi Konvensi ini diambil oleh Yunani setelah mendapat dorongan oleh para anggota parlemen dengan menjalani beberapa proses, seperti yang dikemukakan oleh Christina Olsen, yang bekerja untuk *the Council of Europe Expert Group on Violence Against Women and Domestic Violence* (GREVIO), beberapa langkah yang dilakukan oleh negara-negara untuk meratifikasi *Istanbul Convention* adalah memiliki dukungan dari pemerintah dan parlemen mereka yang membutuhkan mobilisasi dukungan politik yang diperlukan dan melibatkan dialog dengan para pemangku kepentingan (Olsen, 2018). Setelah meratifikasi *Istanbul Convention*, Yunani merancang kebijakan-kebijakan domestik yang selaras dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Istanbul Convention* itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Istanbul*

*Convention* memiliki 4 pilar, maka sebagai negara yang meratifikasi *Istanbul Convention*, Yunani mengimplementasikan kebijakan-kebijakan serta program-program yang selaras dengan 4 pilar pembentukan *Istanbul Convention* yang diambil dari Laporan Dasar (*Baseline Report*) tentang Implementasi *Istanbul Convention* (2022), sebagai berikut:

### **Kebijakan yang Terintegrasi (Integrated Policies)**

*Istanbul Convention* didasarkan pada premis bahwa tidak ada satu lembaga/institusi yang dapat menangani kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga sendirian. Respon yang efektif dalam kasus ini membutuhkan aksi bersama dari berbagai pihak. Maka dari itu, konvensi ini meminta negara-negara pihak untuk menerapkan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, LSM, serta parlemen dan otoritas nasional, regional dan lokal (Council of Europe, n.d.). Untuk itu, Yunani menerapkan beberapa langkah dalam integrasi kebijakan dengan berbagai pihak yang terkait beberapa diantaranya adalah:

- 1) Kebijakan yang komprehensif dan terkoodinasi;** melalui Program *National Action Plan for Gender Equality* (NAPGE) dan terus menjadi prioritas utama untuk NAPGE 2021-2025 yang mencakup serangkaian inisiatif dan tindakan komprehensif untuk pencegahan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Untuk penilaian dan respons yang efektif pada semua kebijakan, termasuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga, *National Council for Gender Equality* (NCGE), sebuah dewan penasihat kolektif yang berada di bawah naungan GSDFPGE, membantu Sekretariat Umum sejak tahun 2020 (GSDFPGE, 2022). GSDFPGE telah memfasilitasi pembentukan struktur pendukung di seluruh negeri, bersama dengan kampanye nasional dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan, untuk memastikan implementasi langkah-langkah di tingkat lokal dan regional.
- 2) Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat Sipil;** terdapat kerja sama yang efektif dengan organisasi di berbagai tingkat, seperti adanya Tim Manajemen Proyek berbagai pemangku kepentingan yang memantau implementasi *Istanbul Convention* yang berisi representasi dari pemerintah maupun non-pemerintah, seperti *the Union of Women Associations of Heraklion Prefecture*, *the European Anti-Violence Network*, *the Coordination of Greek Women's NGOs for the European Women's Lobby*, dan *the National Council of Greek Women*. Kolaborasi berikutnya adalah integrasi kebijakan oleh *Regional Equality Committees and Municipal Equality Committees* mengenai kesetaraan gender ke dalam kebijakan lokal dan regional melalui kerja sama dengan organisasi/jaringan perempuan. Selain itu, GSDFPGE mendatangkan Nota Kesepahaman dengan UNHCR dan UNICEF untuk melindungi pengungsi dan perempuan migran dari kekerasan berbasis gender dan

kekerasan dalam rumah tangga, serta menyelenggarakan pertemuan regional, rapat koordinasi, dan kampanye dengan LSM dan badan-badan PBB untuk kolaborasi yang efektif di tingkat lokal dan regional.

- 3) Pembentukan Badan Koordinasi;** *Istanbul Convention* mewajibkan para negara pihak untuk mendirikan badan resmi yang bertanggung jawab untuk koordinai, implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan dan langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup dalam konvensi ini. GSDFPGE merupakan badan pemerintah di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan kesetaraan gender di Yunani, dan terdiri dari dua Direktorat dan Departemen Independen. GSDFPGE berfokus pada perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan kesetaraan gender di berbagai gender, serta beranggotakan 45 anggota yang berkualifikasi dan telah melalui pelatihan pada isu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Strategi GSDFPGE termasuk mempromosikan tenaga kerja perempuan, memerangi kekerasan berbasis gender, menantang stereotip, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan sektoral, serta secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif Eropa dan internasional, yang berkontribusi pada penghapusan diskriminasi gender (GSDFPGE, 2022).
- 4) Pengumpulan data dan penelitian;** Pengumpulan data sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dari kebijakan yang ada, mengidentifikasi jeda dalam legislasi dan menemukan praktik terbaik (European Parliamentary, 2018). *The Directorate for Planning, Standardization, and Policy Monitoring of Gender Equality* GSDFPGE berdasarkan UU 4531/2018, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan data statistik yang mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan konvensi tersebut, serta untuk menganalisis, memproses dan mempublikasikan hasilnya dengan *The Observatory Department* bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data yang relevan dan mengadakan penelitian dalam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat 9 entitas yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data tentang kekerasan terhadap perempuan, yaitu *The GSDFPGE National Network of Structures for preventing and combating all forms of violence against women, The Ministry of Justice/ Compensation Authority, The General Secretariat of Anti-crime Policy / The Ministry of Citizen Protection /Data from correctional facilities; The Ministry of Citizen Protection/Hellenic Police and Police Departments of Domestic Violence; The Public Prosecutors' District Courts through The Supreme Court's Public Prosecution*

Office, The Ministry of Migration and Asylum, The Ministry of Labour and Social Affairs /National Centre for Social Solidarity (EKKA), The Ministry of Labour and Social Affairs/E-government centre for social security (IDIKA). The Observatory juga menerbitkan buletin elektronik tahunan tentang kekerasan berbasis gender dan berpartisipasi dalam Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan dari GSDFPGE (GSDFPGE, 2022).

### **Pencegahan (Prevention)**

Dalam pilar ini, pada dasarnya *Istanbul Convention* mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah yang mendukung promosi yang mendorong perubahan dalam pola perilaku sosial & budaya perempuan dan laki-laki seperti menghapus adanya prasangka (*prejudice*), hingga stereotip peran antar gender. Beberapa langkah dilakukan:

- 1) Peningkatan Kesadaran;** Yunani menunjukkan komitmennya dalam menyebarkan kesadaran terhadap kesetaraan gender serta pencegahan terhadap kekerasan dengan memberlakukan beberapa kampanye sejak tahun 2018 hingga 2021. Pendanaan untuk operasionalisasi penyebaran kesadaran ini juga ditingkatkan di Yunani (Meurens, et al., 2020). Beberapa contoh kampanye yang dilakukan adalah, pertama pada April 2018-Juni 2019, Yunani menyebarkan selebaran tentang kekerasan, memasang spanduk yang menentang kekerasan dalam berbagai Bahasa, melaksanakan konferensi termasuk konferensi tentang *Istanbul Convention*, iklan di TV dan radio hingga festival film yang berjudul "EQUAL MOVIE 2019". Kampanye kedua dilaksanakan pada April 2020 dengan GSDFPGE meningkatkan kesadaran tentang meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga saat pandemi COVID-19 melalui penayangan kampanye *video spot* "We Stay at Home but We Don't Stay Silent". Pada November 2020, kampanye menggunakan penayangan *video spot* yang berjudul "Ask for Help, Be Your Strength", serta publikasi pertama Laporan tentang Kekerasan terhadap Perempuan oleh GSDFPGE yang berkolaborasi dengan UNICEF dengan salah satu tujuannya untuk mempresentasikan fenomena kekerasan terhadap perempuan di Yunani secara komprehensif. Kampanye berikutnya dilaksanakan pada November 2021 yang mendorong perempuan untuk "mendengarkan tindakan, bukan kata-kata" sambil mendorong mereka untuk berbicara sekarang dengan menelepon saluran bantuan SOS dan menghubungi Pusat Konseling. Dalam pelaksanaan kampanye ini, beberapa pihak juga berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah kampanye yang komprehensif, seperti Festival "Raise Your Voice" yang diselenggarakan oleh Kantor Pelapor Nasional untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia, Kementerian Luar



Negeri, Walikota Athena, dan Organisasi Pariwisata Nasional Yunani dan ditayangkan di YouTube (GSDFPGE, 2022).

- 2) Pendidikan;** Kementerian Pendidikan dan Agama Yunani telah mengimplementasikan program pendidikan yang komprehensif dengan tujuan untuk mempromosikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, peran gender non-stereotip, dan mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Beberapa kebijakan dan program yang telah diambil dalam bidang pendidikan adalah, pertama, adanya sebanyak 166 kurikulum/mata pelajaran baru yang mencakup kesetaraan gender, hak asasi manusia, kekerasan berbasis gender (GBV), kesetaraan dan prinsip-prinsip anti kekerasan yang diterapkan di semua tingkat pendidikan dengan menyesuaikan tingkat pendidikan tersebut. Kedua, adanya integrasi prinsip yang mencakup prinsip kesetaraan gender, hak asasi manusia dan resolusi konflik tanpa kekerasan yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Sosial dan Politik, Sejarah, Studi Lingkungan Hidup, Bahasa Yunani Modern, dan Sastra Yunani. Tidak hanya itu, Yunani juga menerapkan program edukasi seks yang berkolaborasi dengan organisasi kesehatan dan LSM untuk menangani pencegahan, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi (GSDFPGE, 2022).
- 3) Pelatihan Professional;** Terdapat dua jenis pelatihan untuk para professional yang diselenggarakan oleh Yunani, yaitu untuk para professional yang bekerja di Pusat Konseling, Shelters dan hotline SOS, serta untuk para professional di sektor publik. Pertama, Program Pelatihan Konselor yang memiliki 2 program, yaitu program "Pelatihan Pemberian Layanan Konseling kepada Perempuan Korban Kekerasan." Pada tahun 2019, dan program "Pelatihan Pemberian Konseling Tenaga Kerja kepada Perempuan Korban Kekerasan" pada tahun 2020. Program pelatihan berikutnya yaitu Pelatihan dalam Proyek SURVIVOR dengan melatih hingga 20 titik fokus masyarakat untuk mengidentifikasi dan merujuk korban kekerasan berbasis gender dan seminar tentang kekerasan berbasis gender, korban anak dan manajemen kasus (GSDFPGE, 2022). Sedangkan pelatihan untuk professional di sektor public diberikan oleh Pusat Nasional Administrasi Publik & Pemerintahan Lokal (EKDDA) tentang "Aspek Kekerasan Berbasis Gender" di tahun 2018 dengan 370 karyawan yang dilatih; "Mencegah dan Memerangi Kekerasan terhadap Perempuan" di tahun 2018 dengan 700 karyawan yang dilatih; "Perspektif Gender dalam Dunia Kerja" di tahun 2021 dengan 101 pegawai negeri yang dilatih; serta Workshop E-Learning (2020-2021) yang dihadiri lebih dari 500 peserta (GSDFPGE, 2022).

### Perlindungan (Protection)

Pilar ini mewajibkan para pihak konvensi untuk mengambil langkah-langkah legislatif atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk melindungi dan mendukung semua korban dari tindakan kekerasan lebih lanjut sesuai dengan hukum internal untuk memastikan bahwa ada mekanisme yang tepat untuk menyediakan kerja sama yang efektif antara semua lembaga negara yang relevan. terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Yunani, diantaranya adalah **1) informasi yang memadai tentang layanan dukungan yang tersedia:** GSDFPGE menyediakan informasi tentang hak-hak, layanan dukungan dan upaya hukum terhadap perempuan korban kekerasan, termasuk saluran bantuan nasional SOS 15900 yang beroperasi selama 24/7, 44 Pusat Konseling dan *shelter* yang aman. Selain itu GSDFPGE menyediakan informasi yang *up-to-date* melalui situs web dan *platform* sosial media mereka. Beberapa situs web seperti [www.isotita.gr](http://www.isotita.gr), [www.womensos.gr](http://www.womensos.gr), dan [www.metoogreece.gr](http://www.metoogreece.gr) juga menyediakan informasi serupa. Kampanye juga terus dijalankan oleh Yunani, seperti kampanye “*Words like knives*” yang diluncurkan pada tahun 2021 yang mendorong para korban untuk tidak bungkam (GSDFPGE, 2022); **2) Layanan dukungan:** Selain menyediakan informasi yang memadai mengenai kekerasan berbasis gender, Yunani juga mengambil langkah untuk memberikan layanan dukungan secara konkrit kepada para korban kekerasan yang diatur dalam UU No. 3226/2004 dan UU No. 3500/2006 dengan menyediakan layanan-layanan yang mendukung perlindungan terhadap korban, seperti dukungan psikologis, bantuan finansial yang memungkinkan dimasukkannya perempuan korban kekerasan ke dalam program bantuan ini, dukungan dalam bentuk pendidikan/pelatihan dan bantuan untuk mendapat pekerjaan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Hellenic (OAED) yang termasuk layanan dukungan pengalaman kerja, wiraswasta baru hingga layanan masyarakat (GSDFPGE, 2022); dan **3) Pelaporan:** Selain *Istanbul Convention*, Yunani juga meratifikasi ILO *Convention No. 190* tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja (*Elimination of Violence and Harassment in the World of Work*) dan mengimplementasikan konvensi tersebut dalam UU 4808/2021 yang bertujuan untuk melindungi karyawan dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Untuk mencegah dan menangani adanya kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, UU 4795/2021 dibuat untuk mengamankan pembentukan Kantor Independen Konsultan Integritas dalam administrasi publik yang menawarkan saran yang dipersonalisasi tentang masalah etika dan integritas, termasuk pelecehan seksual, diskriminasi, perundungan, dan konflik kepentingan dengan menerima dan memediasi laporan pelanggaran integritas dan memastikan penyelidikan yang adil (GSDFPGE, 2022).

### Penuntutan (Prosecution)

Pilar ini mewajibkan para pihak konvensi untuk mengambil langkah-langkah legislatif atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa investigasi dan proses

peradilan yang berkaitan dengan semua bentuk kekerasan yang tercakup dalam cakupan *Istanbul Convention*. Untuk menerapkan pilar ini, Yunani membentuk hukum-hukum substantif terkait tindakan yang tercakup dalam kekerasan berbasis gender serta sanksi/hukuman terhadap tindakan-tindakan tersebut, seperti kekerasan psikologis, penguntitan, kekerasan fisik, kekerasan seksual termasuk pemerkosaan, kawin paksa, mutilasi alat kelamin perempuan, aborsi paksa hingga sterilisasi paksa. Dalam Undang-Undang Yunani, khususnya dalam konteks pelanggaran yang diuraikan dalam Konvensi, sifat hubungan antara pelaku dan korban tidak dianggap sebagai faktor yang akan mengurangi tingkat keparahan pelanggaran (faktor yang meringankan). Dengan kata lain, terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban, konsekuensi hukum atau hukuman untuk pelanggaran tetap tidak berubah (Council of Europe, 2011).

Pilar ini juga mewajibkan negara-negara yang meratifikasi konvensi ini untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa investigasi dan proses peradilan yang berkaitan dengan semua bentuk kekerasan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan dengan mempertimbangkan hak-hak korban untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan yang efektif atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal: 1) Tanggapan segera, Pencegahan dan Perlindungan; 2) Penilaian dan Manajemen Resiko; 3) Langkah-langkah Perlindungan; dan 4) Bantuan Hukum.

### **Efektivitas *Istanbul Convention* dalam Menangani Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Yunani**

Dalam mengukur efektivitas pembentukan sebuah rezim, dalam kasus ini rezim *Istanbul Convention*, penulis menggunakan 3 variabel dalam teori efektivitas rezim oleh Arild Underdal, yaitu *dependent variable*, *independent variable* dan *intervening variable* (Underdal, 2002).

#### ***Independent Variable***

##### **1. *Type of Problem***

Terdapat 2 jenis tipe permasalahan yaitu *benign* dan *malign*. Untuk menganalisis tipe permasalahan dalam rezim ini, dapat dilihat dari awal pembentukan *Istanbul Convention* seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa pembentukan *Istanbul Convention* mendapat respon yang cukup baik saat pembentukannya dengan sekitar 4 persen dari jumlah anggota CoE menandatangani pembentukan konvensi tersebut di waktu yang sama. Selain itu, sebelum dibentuknya *Istanbul Convention* sendiri, di Eropa sudah ada kesadaran dan upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Pembentukan dan ratifikasi *Istanbul Convention* oleh negara-negara di wilayah Eropa membuktikan upaya

dan komitmen para pihak untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender. Respon CoE serta negara-negara anggota dalam pembentukan *Istanbul Convention* membuktikan karakter tipe permasalahan *benign*, yaitu *coordination* yang menggambarkan situasi harmonis dan selaras diantara anggota rezim, yang dilihat dari adanya tujuan atau kepentingan yang serupa; *symmetry* yang mencerminkan hubungan antara para aktor yang saling terkait, dengan nilai-nilai yang selaras dan sesuai kepentingan, yaitu untuk memerangi kasus kekerasan berbasis gender dengan turut meratifikasi *Istanbul Convention*; dan *cross-cutting cleavages* yang dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan dan hambatan yang signifikan yang menghambat pembentukan hingga implementasi *Istanbul Convention*, terutama di Yunani. Walaupun Yunani baru meratifikasi *Istanbul Convention* pada tahun 2018, hal ini tetap menunjukkan kompromi dan komitmen Yunani dalam menanggulangi masalah yang menjadi fokus konvensi ini, yaitu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

## **2. Problem-solving Capacity**

Indikator berikutnya adalah *problem-solving capacity*, dimana *Istanbul Convention* berperan dengan maksimal di Yunani sebagai salah satu sarana untuk Yunani dapat mengatasi permasalahan kasus kekerasan berbasis gender, karena dengan meratifikasi *Istanbul Convention*, terdapat pengembangan dan penguatan upaya dari Yunani untuk mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender. Terdapat 3 indikator utama dalam melihat kapasitas penyelesaian masalah, yaitu 1) *institutional setting*, 2) *distribution of power*, 3) *skill and energy*. Dalam kasus ini, *Istanbul Convention* sudah memiliki *institutional setting* (peraturan kelembagaan) yang cukup mumpuni, dimana seluruh negara yang meratifikasi konvensi ini wajib untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam konvensi ini dan menyerahkan laporan akhir setiap tahunnya kepada GREVIO, termasuk Yunani sebagai negara yang meratifikasi konvensi ini (Council of Europe, 2011).

Indikator berikutnya, yaitu *distribution of power*, dimana pembagian kekuasaan dalam konvensi ini dapat dikatakan adil, karena tidak ada satu pihak khusus yang mendominasi dalam pengambilan keputusan. *Istanbul Convention* menerapkan dua badan pengawasan yang berbeda namun saling berinteraksi, yaitu melalui badan yang disebut dengan *The Group of Experts on Action Against Violence Against Women and Domestic Violence* (GREVIO) yang merupakan badan independen untuk mengawasi implementasi *Istanbul Convention* oleh negara-negara anggota (pasal 18 *Istanbul Convention*), dan *Committees of the Parties* (CoP) yang dibentuk melalui perwakilan dari negara-negara yang meratifikasi *Istanbul Convention* dan berinteraksi dengan GREVIO dalam menilai kemajuan negara-negara anggota dalam mengimplementasikan *Istanbul Convention* (Council of Europe, 2011). Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan, seperti perubahan atau amandemen

dan keputusan lainnya dilakukan dengan konsensus atau suara bulat, sehingga semua Pihak memiliki suara yang sama.

Indikator berikutnya yaitu *skill and energy* yang dapat dilihat dari *instrumental leadership* melalui *epistemic communities (informal leadership)* yang merupakan sebuah jaringan para ahli yang berkontribusi dalam efektivitas rezim dengan membantu memperkuat basis pengetahuan yang menjadi dasar dari operasional sebuah rezim, serta membantu para pengambil keputusan untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi, mengidentifikasi berbagai solusi kebijakan dan menilai hasil kebijakan (Underdal, 2002). Di Yunani sendiri terdapat komunitas estemik yaitu *the Research Centre of Gender Equality (KETHI)*, yang merupakan badan hukum dibawah Hukum Privat Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial, yang didirikan pada tahun 1994 dan diatur oleh Dewan Administrasi yang beranggotakan lima orang. KETHI mengembangkan tindakan dan melakukan penelitian untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, menghilangkan stereotip gender dalam pendidikan, mendorong rekonsiliasi kehidupan pribadi dan profesional keluarga, mendukung perempuan pengungsi dan migran, mencegah dan memerangi diskriminasi berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual, serta mendorong partisipasi perempuan di pusat-pusat pengambilan keputusan dan posisi-posisi yang memiliki tanggung jawab (GSDFPGE, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Istanbul Convention* memenuhi ketiga indikator kapasitas penyelesaian masalah, menjadikan *Istanbul Convention* efektif di Yunani untuk menangani permasalahan kekerasan berbasis gender.

## **Dependent Variable**

### **1. Output**

Dikutip dari *Annual Baseline Report* yang dikeluarkan oleh GSDFPGE (2022), terdapat berbagai *output* dalam bentuk kebijakan yang dihasilkan dari ratifikasi *Istanbul Convention* oleh Yunani dalam implementasinya. Beberapa *output* kebijakan yang dapat digarisbawahi dalam implementasi *Istanbul Convention* di Yunani adalah dilaksanakannya pengumpulan data yang bekerja sama dengan berbagai pihak; kampanye-kampanye yang menyuarakan informasi dan dukungan korban untuk berani berbicara dan melapor; dibentuknya saluran bantuan darurat untuk pelaporan kasus kekerasan berbasis gender; pendirian tempat penampungan (*shelter*) bagi para korban kekerasan berbasis gender; layanan dukungan kepada korban termasuk bantuan hukum, konseling dan prosedur hukum baru untuk meminta pertanggungjawaban pelaku; adanya pelatihan untuk para profesional di berbagai sektor pekerjaan; hingga adanya kurikulum-kurikulum pendidikan baru yang mencakup pendidikan seks dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, resolusi konflik tanpa kekerasan, serta penghapusan stereotip peran gender (GSDFPGE, 2022). Berdasarkan jenis *output* yang dikeluarkan, *output* kebijakan dalam implementasi

*Istanbul Convention* di Yunani mencapai level 2, yaitu adanya langkah domestic yang diambil dan dilakukan negara anggota rezim yang mengikuti nilai-nilai dan tujuan rezim (Underdal, 2002).

## 2. Outcome

Komponen *dependent variable* berikutnya yaitu *outcome*, yaitu perubahan perilaku yang berimbas dari ketentuan yang ada di rezim. Dalam kasus ini, Yunani menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender, yang dibuktikan dengan kepatuhan Yunani terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan dalam *Istanbul Convention*, termasuk adanya hal-hal yang sebelumnya tidak ada seperti upaya pengumpulan data yang komprehensif untuk mendukung implementasi *Istanbul Convention* yang baik dan efektif. Selain itu, pengembangan kebijakan seperti kerangka hukum, penguatan layanan dukungan untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender yang berpihak pada korban juga dilakukan oleh Yunani.

## 3. Impact

Komponen terakhir adalah *impact*, yaitu akibat yang timbul dan terkait dengan efektivitas yang mengindikasikan kesuksesan rezim dalam mencapai tujuan rezim (Underdal, 2002). *Impact* sebuah rezim dapat dilihat dari bagaimana anggota rezim tersebut menjalankan ketentuan yang diatur. Berdasarkan standar tersebut, *Istanbul Convention* memiliki dampak yang baik, terutama di Yunani, karena adanya *Istanbul Convention* respon dan penanganan terhadap kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Yunani menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan serta standar yang ditetapkan oleh *Istanbul Convention*.

### **Intervening Variable**

Variabel ini menjelaskan tingkat kolaborasi dalam kerangka kerja suatu rezim. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat 6 level yang digunakan untuk mengukur tingkat kolaborasi dalam sebuah rezim. Berdasarkan skala ordinal tingkat kolaborasi, implementasi *Istanbul Convention* di Yunani dapat digolongkan dalam skala 4 (empat) dengan adanya koordinasi yang terencana dan adanya implementasi pada tingkat nasional atau domestik serta adanya penilaian terhadap efektivitas langkah-langkah dan kebijakan yang telah diambil dalam skala nasional oleh badan pengawasan *Istanbul Convention*, yaitu GREVIO.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa *Istanbul Convention*, dengan indikator tipe permasalahan benign, menunjukkan karakteristik *coordination*, *symmetry*, dan *cross-cutting cleavages*, mempengaruhi positif Yunani dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender. Kemudian, dalam penyelesaian masalah, konvensi ini memiliki *institutional setting* yang solid, distribusi kekuasaan yang adil, dan dukungan dari *epistemic community*, seperti *Research Centre of Gender Equality* di Yunani. Selanjutnya, output kebijakan dan perilaku yang berubah menunjukkan kesuksesan implementasi *Istanbul*

Convention di Yunani, dengan tingkat kolaborasi pada skala 4. Oleh karena itu, Istanbul Convention efektif dalam menanggapi kekerasan berbasis gender di Yunani.

## DAFTAR PUSTAKA

### Books:

Krasner, S. (1983). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. In S. D. Krasner (Ed.), *International Regimes*. Cornell University Press.

Rico, M. N. (1997, June). Gender-based Violence: "A Human Rights Issue". Retrieved from <https://hdl.handle.net/11362/5860>

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

### Book chapters:

Underdal, A. (2002). One Question, Two Answers. In E. Miles, A. Underdal, S. Andresen, J. Wettestad, & J. Skjaereth, *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. MIT Press.

### Journal articles:

Antoniou, E., & Iatrakis, G. (2019, October 31). Domestic Violence During Pregnancy in Greece. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Retrieved December 24, 2023, from <https://www.mdpi.com/1660-4601/16/21/4222>

Kravvariti, V., & Browne, K. (2023, February 25). Police Recognition of Gender Issues in Relation to Intimate Partner Domestic Violence and Abuse in Greece. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 17. Retrieved December 31, 2023, from <https://academic.oup.com/policing/article/doi/10.1093/policing/paad005/7058107#399591434>

Meurens, N., D'Souza, H., Mohamed, S., Leye, E., Chowdhury, N., Charitakis, S., & Regan, K. (2020). Tackling violence against women and domestic violence in Europe: The added value of the Istanbul Convention and remaining challenges. *European Union*. Retrieved December 28, 2023, from <https://researchportal.port.ac.uk/en/publications/tackling-violence-against-women-and-domestic-violence-in-europe-t>

Sosa, L. (2020). The Istanbul Convention in the context of feminist claims. *Utrecht University*, 25-42. Retrieved December 28, 2023, from <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/395188>

### World Wide Web:

Council of Europe. (n.d.). *Action against Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention): The Convention in Brief*. Retrieved November 22, 2023, from Council of Europe Portal: [https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-convention-in-brief#%2211642062%22:\[3\]](https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-convention-in-brief#%2211642062%22:[3])

Council of Europe. (n.d.). *Key facts about the Istanbul Convention - Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence*. Retrieved October 10, 2023, from The Council of Europe: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/key-facts>

European Institute for Gender Equality. (n.d.). *European Union | 2022 | Gender Equality Index | European Institute for Gender Equality*. Retrieved October 9, 2023, from European Institute for Gender Equality: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country>

European Institute for Gender Equality. (n.d.). *Greece | 2022 | Gender Equality Index | European Institute for Gender Equality*. Retrieved October 9, 2023, from European Institute for Gender Equality: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/EL>

European Parliament. (2022, November 17). *The Istanbul Convention: A tool for combating violence against women and girls | Think Tank*. Retrieved October 10, 2023, from European Parliament: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS\\_ATA\(2022\)738222](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738222)

European Parliamentary. (2018, November). *The Istanbul Convention: A tool to tackle*. Retrieved December 31, 2023, from European Parliamentary: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630297/EPRS\\_ATA\(2018\)630297\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630297/EPRS_ATA(2018)630297_EN.pdf)

#### Reports:

Council of Europe. (2011, May 11). *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*. Istanbul: Council of Europe. Retrieved October 1, 2023

European Commission. (2022, November 24). *Fight Violence Against Women*. Retrieved October 9, 2023, from European Commission: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement\\_22\\_7113](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7113)

Greek Republic. (2021). *Domestic Violence Services Project Annual Report Year 2021*. Athens: Greek Republic.

GSDFPGE. (2022). *Greece's Report on The Implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)*. Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO). Retrieved September 30, 2023

UN Women. (n.d.). *Global Database on Violence against Women*. Retrieved from UN Women: <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/greece#1>

#### Interview:

Olsen, C. (2018, June 17). *ANA interviews CoE official Christina Olsen on Greece's adoption of the Istanbul Convention*. (E. Ntziouni, Interviewer) Retrieved January 2, 2024, from <https://www.amna.gr/home/article/267863/>